

EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Andi Mitha Monalisa Br^{1*}, Muhlis Madani², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out and analyze the effectiveness of the performance accountability system of government agencies in increasing local government accountability in Wajo Regency. The type of research used descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and observations. The results of this study showed that the implementation of the Performance Accountability System for Government Agencies (SAKIP) at the Regional Secretariat of Wajo Regency had not effectively. As shown in the following three dimensions: 1) The overall goal achievement had been carried out in stages related to the implementation of SAKIP but was not optimal because it was still focused on improving the Planning and Measurement stage related to the implementation of SAKIP. 2) The integration of processes and procedures related to socialization were not according to expectations, and one of the obstacles was the response from the leadership of the Regional Apparatus to attend activities related to the implementation of SAKIP and only sent to be represented so that communication was not optimal. 3) The adaptation carried out in the implementation of SAKIP had not run effectively. This was because the availability of facilities and infrastructure based on IT connections was not adequate even though office equipment and supplies were adequate and there was still a lack of guidance on human resources.

Keywords: *effectiveness, performance accountability system, government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo belum berjalan dengan Efektif. Sebagaimana yang tampak dalam tiga dimensi berikut: 1) Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap Perencanaan dan Pengukuran terkait Pelaksanaan SAKIP. 2) Integrasi proses dan prosedur terkait sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, dan salah satu yang menjadi kendala adalah respon dari pimpinan Perangkat Daerah untuk hadir pada kegiatan terkait penyelenggaraan SAKIP dan hanya mengutus untuk diwakilkan saja sehingga komunikasi tidak optimal. 3) Adaptasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai serta masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia.

Kata kunci: efektivitas, sistem akuntabilitas kinerja, pemerintah

* andimithamonalisa@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan Pembangunan menuju terciptanya pemerintahan yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang merupakan tujuan dari setiap instansi pemerintahan di Indonesia. Agar terciptanya pemerintahan yang baik salah satu cara yang dilakukan yaitu perlu adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Seiring berjalannya waktu, pengukuran kinerja pada instansi pemerintahan mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran kinerja yang berorientasi pada input kini bergeser pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil. Dalam hal ini diperjelas secara tertulis dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan instansi yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik dan berorientasi hasil, maka Pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas

berupa kondisi yang ingin diwujudkan, menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Peneliti merumuskan permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana Efektivitas penyelenggaraan sistem ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penyelenggaraan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Hasil penelitian terkait yaitu Efektivitas penerapan SAKIP pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Christy, Setiana, Cintia 2017) menunjukkan bahwa SAKIP berorientasi insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja PNS. Simpulan yang berikutnya adalah SAKIP berorientasi eksplorasi mempengaruhi kinerja PNS. Penggunaan sistem pengukuran kinerja eksplorasi yang melibatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti pembelajaran, pelatihan-pelatihan dan eksperimen-eksperimen cenderung dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dibandingkan dengan pengukuran kinerja insentif.

Penelitian kedua dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan SAKIP Kota Payakumbuh (Murdi & Putri) dengan hasil penelitian bahwa penilaian efektivitas dari perspektif sistem dengan menggunakan tiga komponen yaitu: input, proses, dan output. Sebagai suatu sistem, organisasi menerima input dari lingkungannya, memproses dan kemudian memberikan output pada lingkungannya. Dari segi perilaku manusia, penilaian efektivitas disebutkan sangat berperan besar, dimana dengan pengaruh perilaku manusia dapat meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus dapat membuat suatu organisasi tidak efektif.

Penelitian ketiga dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan SAKIP di Kabupaten Serdang Begadai dengan Budaya kerja Sebagai Variabel Moderating (Nababan, 2016) pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Komitmen Pemerintah Daerah, dan dukungan Pemerintah Pusat secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di kabupaten Serdang Begadai. Budaya kerja dapat memoderasi hubungan antara pedoman SAKIP, Komitmen Pemerintah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat.

Efektivitas menurut Mardiasmo (Sari, Mintarti, Pattisahusiwa, 2018) pada dasarnya berhubungan dengan Pencapaian Tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Mahmudi (Sartika, 2019) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas adalah berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target kebijakan. Apabila suatu Organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi itu dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Konteks efektivitas tidak dihubungkan dengan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan dan target kebijakan. Efektivitas SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas daerah menggunakan indikator pengukuran kriteria efektivitas yang dikemukakan Duncan (Nani, Rowa, & Martini, 2021) yang mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah : 1) pencapaian Tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan,. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang

merupakan target konkrit, 2) integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi, 3) adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Terdapat beberapa indikator Efektivitas Kerja menurut Hasibuan (Arifin, Zulfiani, 2017) efektivitas merupakan suatu keberhasilan usaha dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam suatu organisasi perlunya pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat menimbulkan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu dan peningkatan sumber daya manusia.

Penyelenggaraan SAKIP dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi : 1) Rencana Strategis, 2) perjanjian Kinerja, 3) Pengukuran Kinerja, 4) Pengelolaan Data Kinerja, 5) Pelaporan Kinerja, 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Keenam komponen tersebut merupakan satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, visi-misi dalam organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif yang akan memberikan gambaran tentang keadaan di lokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 orang yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dan orang yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang akurat.

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan, tehnik wawancara yang dimana peneliti akan mewawancarai informan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo dan tehnik dokumen atau arsip yang diperoleh. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah langkah selanjutnya yaitu, reduksi data dimana data yang diperoleh akan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting serta suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang data yang tidak perlu, penyajian data ialah proses penyusunan informasi untuk menentukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan dan penarikan kesimpulan ialah dimana dalam penarikan kesimpulan kita akan menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dalam Penelitian menggunakan teori Duncan, dilihat dari tiga (3) dimensi, yaitu:

Pencapaian Tujuan

Tujuan SAKIP secara umum adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya atas keberhasilan dan kegagalan program penyelenggaraan misi organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu serta penentuan sasaran yang tepat dapat membantu penyelenggara dalam membuat keputusan serta dalam proses pencapaian tujuan. Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo dilihat dari dimensi pencapaian tujuan yaitu

menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo sudah melakukan pentahapan dalam pelaksanaan SAKIP, dalam hal ini pentahapannya memiliki langkah yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Namun dalam hal pencapaian tujuan sasaran masih terdapat pemahaman pejabat yang kurang dalam tahap perencanaan terhadap fokus Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam hal kurun waktu yang sudah ditentukan dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2020 menunjukkan bahwa memenuhi kriteria sangat tinggi, sedang dan ada indikator yang belum ada hasil. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kurun waktu dalam pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun ada sasaran indikator masih belum berjalan dengan maksimal. Sehingga perlu perbaikan untuk masa yang akan datang.

Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan membangun komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Kaitannya dengan penyelenggaraan SAKIP yaitu integrasi antara seluruh perangkat daerah sejak perencanaan strategis hingga implementasi setiap program kegiatan dalam upaya pencapaian visi pemerintah daerah sesuai indikator-indikator yang ditetapkan. Secara proses dan prosedur dalam melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo sudah berjalan, namun tidak berjalan Optimal. Disebabkan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan terbatas dilakukan karena persoalan anggaran yang dibatasi. Dari hasil penelitian juga ditemukan kendala bahwa respon dari pimpinan perangkat daerah masih kurang untuk hadir sebagai bentuk komitmennya terkait penyelenggaraan SAKIP dan hanya mengutus untuk diwakilkan. Berdasarkan hasil penelitian dan disesuaikan dengan teori efektivitas yang dikemukakan Duncan bahwa dalam aspek pengembangan konsensus dan komunikasi belum berjalan dengan optimal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.

Adaptasi

Zaman terus mengalami perubahan dan organisasi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada agar tetap bertahan. Keberhasilan

perubahan dapat terjadi apabilaantisipasi dalam organisasi dilakukan dengan adaptasi. Tolak ukur dari efektivitas SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo dilihat dari dimensi adaptasi adalah terkait dengan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian sarana dan prasarana dari segi peralatan kantor sudah memadai namun yang menjadi kendala adalah ketersediaan sarana yang berbasis IT yang mempermudah koneksi. Aplikasi yang dihibahkan oleh pemerintah Kota Bandung sangat bagus namun belum bisa digunakan di Kabupaten Wajo dikarenakan konektivitasnya belum terintegrasi. Sekretariat Daerah kabupaten Wajo masih berfokus pada perbaikan perencanaan dan pengukuran sehingga setelah dua aspek ini sudah baik, akan ditindak lanjuti perbaikan aplikasi E-SAKIP untuk diterapkan. Dalam peningkatan pelaksanaan SAKIP kemampuan daya tangkap SDM menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dari hasil penelitian upaya yang dilakukan untuk peningkatan SDM terkait pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo adalah Bimtek, pelatihan dan workshop terkait pelaksanaan SAKIP. Namun upaya tersebut sudah tidak dilakukan selama

pandemi dan hanya melakukan koordinasi secara mandiri dalam penyusunan SAKIP. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan teori efektivitas yang dikemukakan Duncan dalam penyelenggaraan SAKIP diperoleh hasil bahwa indikator sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo belum efektif, namun dalam hal ini terdapat keinginan pemerintah Kabupaten Wajo untuk terus berupaya menyesuaikan kinerja perangkat daerah agar dapat memertahankan kualitas kerjanya sesuai dengan perubahan-perubahan yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Ekeftivitas SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo dilihat dari dimensi Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap Perencanaan dan Pengukuran terkait Pelaksanaan SAKIP. Meskipun dalam hal sasaran yang menjadi target dalam indikator yang telah ditetapkan telah berjalan dan meningkat setiap tahunnya serta dalam hal ketepatan waktu sudah dijalankan

dengan baik.

Dilihat dari dimensi Integrasi proses dan prosedur terkait sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, dan salah satu yang menjadi kendala adalah respon dari pimpinan Perangkat Daerah untuk hadir pada kegiatan terkait penyelenggaraan SAKIP dan hanya mengutus untuk diwakilkan saja, sehingga dalam hal pengembangan konsensus dan komunikasi belum optimal. Dilihat dari dimensi Adaptasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. serta masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia disebabkan terbatasnya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., Zulfiani, I. D., & Sos, S. (2017). Hubungan Antara Disiplin Kerja Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur Sangatta. *eJurnal Administrasi Negara*, 5(3).
- Christy, Y., Setiana, S., & Cintia, P. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan

- Dan Pelatihan; Bagian Umum Dan Perlengkapan Dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik). *Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Murdi, H., & Putri, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 50–66.
- Nababan, M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Budaya Kerja Sebagai Variabel Moderating.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 102–111.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *KINERJA*, 15(1), 38–43.
- Sartika, D. (2019). *Analisis Efektifitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang).